

## **BAB II**

### **Faktor Pendorong Keputusan Sudan Membuka Hubungan Diplomatik dengan Israel**

#### **2.1 Kondisi Domestik Sudan**

Salah satu faktor yang mendorong dilakukannya pembukaan hubungan diplomatik antara Sudan dan Israel adalah kondisi domestik Sudan yang bisa dibilang sudah putus asa. Dari segi ekonomi, sejak merdeka pada tahun 1956, Sudan memang masih terus termasuk dalam negara miskin, walau demikian beberapa tahun terakhir, tepatnya mulai tahun 2011, perekonomiannya mengalami keterpurukan yang lebih lagi. Fakta ini didukung dengan tingginya tingkat inflasi yang terjadi di Sudan mulai tahun 2011 dan terus terjadi di tahun-tahun setelahnya yang menjadi salah satu tertinggi di dunia dan terancam masuk menjadi negara dengan status hiperinflasi (Werr, 2020).

Krisis ekonomi yang terus terjadi bertahun-tahun lamanya menyebar berimbas pada sektor lainnya, seperti sektor politik. Hal ini menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran dan yang berhasil menyebabkan terjadinya penggulingan Presiden Omar Al-Bashir yang sudah menjabat 30 tahun lamanya. Demi menjelaskan kedua kondisi tersebut, dibutuhkan penjelasan mengenai hal apa yang menjadi salah satu pendorong terbentuknya kondisi Sudan yang seperti itu, yaitu perpecahan Sudan Utara dan Sudan Selatan pada tahun 2011.

### **2.1.1 Sejarah Perpecahan Sudan Utara dan Sudan Selatan**

Pada tahun 1956, dengan bantuan Mesir dan Inggris, Sudan berhasil menjadi negara berdaulat dengan mendeklarasikan kemerdekaannya dari Inggris. Sudan merupakan negara terbesar di Benua Afrika dengan luas 1.609.344 km<sup>2</sup> (Wulandari 2021), dengan populasi sebanyak 33 juta jiwa, terdiri dari mayoritas Etnis Afrika yang berkulit hitam, Etnis Arab, dan beberapa etnis lain dengan presentase kecil. Secara geografis, lokasi Sudan berbatasan dengan Libya dan Mesir dibagian utara, Uganda dan Kongo dibagian Selatan, Ethiopia dan Eritrea dibagian Timur, dan Afrika Tengah dan Chad dibagian Barat.

Berikut merupakan gambar peta Sudan saat kedua wilayah, yaitu Sudan Utara dan Sudan Selatan masih bersatu dan belum terpecah :

**Gambar 2.1 Peta Sudan Tahun 2010, Peta Sudan Sebelum Perpecahan**



Sumber : <https://reliefweb.int/map/sudan/sudan-reference-map-2010> tahun 2010.

Berdasarkan agama dan etnis, Sudan terbagi menjadi dua wilayah, Sudan Utara dan Sudan Selatan. Masyarakat Sudan bagian utara mayoritas keturunan Arab dan beragama Islam, sementara Sudan bagian selatan memiliki mayoritas keturunan Afrika yang berkulit hitam dan beragama Kristen. Secara sehari-hari karena kedua

wilayah memiliki banyak perbedaan yang cukup banyak dari segi agama, gaya hidup, kebudayaan, dan lain-lain, mereka cenderung beraktivitas secara terpisah (Hadi, 2006).

Perdana Menteri pertama Sudan pada tahun 1956, Ismail Al Azhari cukup kewalahan dalam mengurus Sudan, tidak bisa dipungkiri memang saat itu kondisi Sudan sangatlah buruk. Sudan dikenal sebagai negara yang sangat miskin; tidak berhenti disitu, kondisi politiknya pun tidak baik-baik saja. Karena memiliki lahan yang luas, pertanian dan peternakan menjadi pilar penting bagi Sudan yang memberi kontribusi 40% Pendapatan Domestik Bruto tahunan Sudan. Dalam upayanya mendukung hal ini, tidak jarang pemerintah ikut berupaya melakukan diversifikasi jenis tanaman. Selain dari pertanian dan peternakan, Sudan juga berkecimpung di bidang perminyakan. Pembangunan nasional sedikit demi sedikit mulai dilakukan oleh Pemerintah Sudan, selain pembangunan secara domestik, Pemerintah Sudan juga mulai memberi perhatian terhadap kebijakan luar negerinya. Sudan mulai berfokus membentuk kerjasama ekonomi dengan negara lain khususnya negara-negara tetangga.

Walau demikian, kondisi Sudan yang buruk, maupun kemajuan yang terjadi tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada Ismail Al Azhari karena pemerintahan Sudan mengalami pergantian yang sangat bahkan terlalu sering dikemudian harinya, hingga 12 kali dalam jangka waktu 32 tahun . Pemerintahan Al Azhari dilengserkan oleh Jendral Abdullah Khalll. Jendral Khall lalu dilengserkan oleh Jenderal Abboud. Tidak lama setelahnya Jendral Al Khatim Al Khalifa

menggantikan Perdana Menteri Sudan yang menjabat dan lalu dilengserkan oleh Ahmad Maghoub. Hal yang sama terjadi pada perdana menteri setelahnya, yaitu Sadiq al-Mahdi, Babiker Awadalla, Gaafar Nimelry, Rashid Bakr, al-Jazull Dafalla, dan Sadiq al-Mahdi. Setelah Sadiq al-Mahdi, Omar Al Bashir memimpin sebuah kudeta militer tak berdarah, dan berhasil memimpin Sudan untuk beberapa tahun kedepan.

Di bawah kepemimpinan Omar Al Bashir, awal-awalnya, perekonomian Sudan mengalami kemajuan. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui grafik di bawah ini :

**Grafik 2.1 Tingkat Inflasi Sudan Tahun 1980-2016**



sumber : <https://id.tradingeconomics.com/sudan/inflation-cpi> tahun 2021.

Dapat dilihat dari grafik di atas bahwa pada tahun 1999-2000, Sudan mengalami penurunan tingkat inflasi. Selain dari hal itu, Sudan juga mengalami pertumbuhan ekonomi, kemajuan pembangunan infrastruktur dan tercapainya perkembangan pembangunan nasional dalam berbagai bidang. Di lain sisi,

walaupun pertumbuhan dalam sektor ekonomi terus terjadi, terdapat satu hal lain yang juga tidak dapat diselesaikan dan masih terjadi, yaitu perang saudara antara Sudan Utara dan Sudan Selatan yang terjadi sejak kemerdekaan dan belum kunjung selesai di bawah pemerintahan Omar Al Bashir.

Seperti yang sudah dituliskan di atas bahwa terdapat banyak sekali perbedaan antara masyarakat Sudan Utara dan masyarakat Sudan Selatan, seperti perbedaan dalam hal budaya, etnis, dan agama. Sedikit penjelasan, Sudan Utara mayoritas diduduki oleh masyarakat keturunan Arab dan beragama Islam, sementara Sudan Selatan mayoritas diduduki oleh masyarakat keturunan Afrika dan beragama Kristen. Pada saat Sudan berhasil mendeklarasikan kemerdekaannya, Perdana Menteri pertama Sudan berasal dari partai politik Sudan Utara. Pada masa pemerintahannya pun, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat diskriminasi terhadap masyarakat Sudan Selatan.

Pemerintahan yang dipegang etnis Arab atau kaum bagian utara sering berlaku tidak adil terhadap kaum Sudan Selatan atau etnis Afrika. Contohnya pada hal pembagian wilayah, etnis Arab cenderung mendapatkan wilayah yang lebih subur, yaitu wilayah utara, pendapatan dari sektor minyak yang di mana kebanyakan bersumber dari Sudan Selatan, digunakan untuk lebih banyak pembangunan di Sudan Utara. Pada awalnya, “perang saudara” ini mungkin belum berwujud sepenuhnya seperti perang dan hanya sebatas perselisihan, walau demikian, pada tahun 1971, Joseph Lagu membentuk sebuah pergerakan bernama *Southern Sudan Liberation Movement* (SSLM) yang dibentuk demi mengorganisir tujuannya, yaitu memerdekakan Sudan Selatan.

Perang Saudara terus terjadi hingga pada tahun 1972, dampak yang sangat besar tidak hanya terjadi kepada sektor ekonomi, bahkan korban jiwa juga banyak yang harus dikorbankan. Salah satu dampak ekonomi yang Sudan Selatan rasakan adalah dalam di mana walau kebanyakan lokasi minyak berada di Sudan Selatan, namun Sudan Utara lah yang dapat lebih merasakan keuntungannya, kebanyakan dari masyarakat Sudan Selatan yang beretnis Afrika hanya menjadi budak dari masyarakat Sudan Utara yang beretnis Arab.

Hal ini menyebabkan kedua pihak, yaitu Pemerintah Sudan Utara dan SSLM sepakat untuk menandatangani Perjanjian Addis yang berisi bahwa akan dibentuk pemerintahan otonomi di Sudan Selatan, di mana Sudan Selatan akan berhak memiliki badan eksekutif dan legislatifnya sendiri. Tentara Anya Nya juga terintegrasi kepada kepolisian dan tentara Sudan. Sayangnya semuanya tak berarti apa-apa, janji hanya sekedar janji dan pembangunan pemerintahan otonomipun tidak ada buktinya.

Janji palsu ini dapat dilihat dari pemaksaan pihak Sudan Utara terhadap Sudan Selatan dalam kewajiban mematuhi kebijakan yang Sudan Utara ambil, seperti terhadap perubahan menjadi negara Islam. Pada tahun 1983, saat Sudan berada di bawah kepemimpinan Jendral Numeiri, terjadi suatu besar yang terjadi. Jendral Numeiri mengubah Sudan menjadi negara Islam, maka dari itu otomatis Hukum Syariat Islam diberlakukan tanpa pengecualian. Tidak berhenti di sini, Pada saat Omar Al Bashir mulai menjabat, Hukum Syariat Islam justru makin diperketat (Tuwo, 2020). Meresponi hal ini, Sudan Selatan sangat tidak terima dan bisa dibayangkan marah besar. Pemimpin revolusioner John Garang mengajak 3000 pasukan

membentuk Sudan People's Liberation Army (SPLA). SPLA lalu bersama dengan Sudan People's Liberation Movement (SPLM) bergabung untuk melawan pemerintahan Bashir (Tirta, 2021). Hal inilah yang memicu terjadinya Perang Saudara Kedua antara Sudan Utara dan Sudan Selatan.

Perang Saudara yang terjadi akhirnya menemukan titik terang dengan disepakatinya perjanjian damai pada tahun 2005 antara kedua pihak. Perjanjian damai ini berisi mengenai pengadaan referendum bagi masyarakat Sudan Selatan. Pada tahun 2011, dilakukan sebuah referendum mengenai pendapat masyarakat Sudan mengenai kemerdekaannya dan hasilnya adalah 98,3% menginginkan terjadinya kemerdekaan Sudan Selatan. Maka dari itu, Sudan Selatan resmi merdeka, menjadi sebuah negara sendiri dan sudah mendapatkan pengakuan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berikut adalah peta Sudan Utara dan Sudan Selatan setelah terjadinya perpecahan pada tahun 2011 :

**Gambar 2.2 Peta Sudan Utara dan Sudan Selatan Tahun 2011**



Sumber: <https://geology.com/world/sudan-satellite-image.shtml> tahun 2018.

### 2.1.2 Kondisi Ekonomi Sudan setelah Perpecahan

Perpecahan yang diupayakan oleh Sudan Selatan sebenarnya tidak sepenuhnya menguntungkan, apalagi bagi Sudan Utara. Perekonomian Sudan Utara

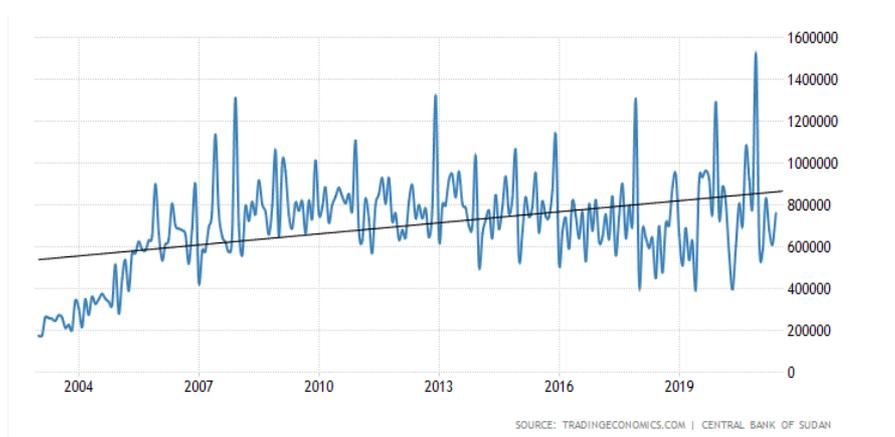
yang 70-80% berasal dari perminyakan, dan perekonomian Sudan Selatan yang 98% berasal dari perminyakan menjadi terganggu (DW, 2021). Menurut *International Monetary Fund Report*, jika di bagi kedalam tiga kelompok, dalam sektor nyata, Sudan kehilangan kurang lebih 75% pendapatannya dari sektor minyak, dan 5-10% dari sektor ekonomi lainnya yang nilainya sama dengan kurang lebih 50 milyar *Sudanese Pound* (SDG) (IMF, 2012). Dalam sektor fiskal, diperkirakan Sudan mengalami penurunan *Gross Domestic Product* (GDP) sebesar 12 milyar SDG yang diperkirakan berasal dari hilangnya sebagian pendapatan dari minyak dan juga dari masyarakat yang sekarang menjadi masyarakat Sudan Selatan. Yang ketiga, dalam faktor eksternal, dikarenakan adanya berkurangnya ekspor minyak dari Sudan Utara, hal ini mengakibatkan kerugian mencapai 6.6 milyar SDG.

Hal ini demikian karena faktanya 2/3 kilang minyak Sudan berada di Sudan Selatan dan pipa ekspor berada di Sudan Utara. Pasca perpecahan, perusahaan minyak yang aktif di Sudan Selatan adalah Petrodar, *Greater Nile Petroleum Operating Company* (GNPOC), dan *White Nile Petroleum Operating Company* (WNPOC), sementara perusahaan yang masih aktif di Sudan Utara hanya tersisa GNPOC dan *Petro Energy*. Sebenarnya kedua wilayah ini saling membutuhkan satu sama lain, di mana walaupun 2/3 kilang minyak berada di Sudan Selatan, untuk melaksanakan proses ekspor, Sudan Selatan membutuhkan pipa minyak yang berada di Sudan Utara melalui *Port Sudan* (Wahiduddin, 2020). Mengenai hal ini, maka kedua negara melakukan negosiasi mengenai harga dari penggunaan pipa minyak tersebut. Perundingan mengenai negosiasi harga penggunaan pipa minyak

Sudan Utara menjadi salah satu aspek yang mendukung terjadinya konflik karena Sudan Selatan mengajukan harga penggunaan pipa sebesar US\$1, sedangkan Sudan Utara meminta biaya penggunaan sebesar US\$32.

Sejak terjadinya perpecahan, Sudan yang memang sebelumnya masuk kedalam negara miskin, masih harus tetap berada pada posisi tersebut, dan justru tambah terperosok di mana inflasi terus terjadi, persediaan bahan makanan yang terus menipis karena menurunnya kemampuan impor sebagai akibat dari krisis mata uang yang terjadi, menurunnya pendapatan ekspor, menurunnya daya beli masyarakat, dan banyak hal lainnya (Africa News, 2018). Berikut merupakan grafik impor Sudan tahun 2004-2019 :

**Grafik 2.2 Grafik Impor Sudan Tahun 2004-2019**



source : <https://id.tradingeconomics.com/sudan/imports>. Tahun 2021.

Dan sebagai data pendukung, berikut merupakan grafik ekspor Sudan tahun 2004-2019 :

**Grafik 2.3 Grafik Ekspor Sudan Tahun 2004-2019**



source : <https://id.tradingeconomics.com/sudan/exports> Tahun 2021

Kedua grafik di atas menunjukkan adanya *trend* meningkatnya tingkat impor Sudan dan *trend* menurunnya tingkat ekspor Sudan Awal dari terjadinya krisis ekonomi yang sangat parah ini terjadi pada tahun 2018 dan tidak berhenti disitu, krisis terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya.

Berikut adalah grafik tingkat inflasi Sudan tahun 1986-2021 :

**Grafik 2.4 Tingkat Inflasi Sudan Tahun 1986-2021**



Sumber : <https://www.statista.com/statistics/727148/inflation-rate-in-sudan/> tahun 2021.

Dalam gambar statistik di atas, ditunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebanyak kurang lebih 30% tingkat inflasi di Sudan sehingga mencapai angka 63.29% pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 32.35% pada tahun 2017. Setelah itupun ditunjukkan adanya kenaikan yang lebih signifikan lagi yang terjadi pada tahun 2020, di mana peningkatannya mencapai angka 163.26% dan meningkat lagi pada tahun 2021 di angka 197.12%.

Pada tahun 2018, saat inflasi terus bertambah parah, masyarakat mulai merasakan penderitaan yang begitu dalam. Harga makanan pokok menjadi dua kali lipat, persediaan bahan bakar sangat sedikit, dan krisis mata uang merupakan beberapa hal yang terjadi pada tahun 2018 (CMI, 2018). Inflasi di Sudan menjadi salah satu tertinggi di dunia karena pemerintah harus terus mencetak uang demi mendanai defisit anggaran yang besar yang digunakan untuk menyubsidi biaya

bahan bakar. Hal ini menyebabkan inflasi Sudan mencapai angka 230% dan melemahnya mata uang Sudan dengan mata uang asing. Pada masa ini, situasi di negara ini dikatakan seakan seperti bom waktu yang dapat meledak sewaktu-waktu, masyarakat berebut mengantri pom bensin dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), beberapa mesin ATM sampai kehabisan uang tunai dan tidak sedikit masyarakat yang bahkan tidak dapat menarik uang tunai dan gajinya karena ATM sudah kehabisan uang.

Menanggapi hal ini, Presiden Omar Al-Bashir meresponi dengan beberapa kebijakan seperti penarikan subsidi bahan bakar dan beberapa kebijakan lain demi menyelamatkan negaranya dari kehancuran dikarenakan krisis ekonomi yang terus menerus terjadi. Penderitaan yang sudah terlalu parah ini mendorong untuk masyarakat Sudan melakukan protes mengenai ketidakpuasannya kepada Pemerintahan Sudan.

19 Desember 2018, di Kota Atbara, demonstrasi pertama dilakukan dan tidak sampai seminggu, demonstrasi menyebar dan lalu dilakukan di ibu kota Sudan, Karthoum. Demonstrasi ini merenggut banyak korban jiwa, dan Pemerintah Sudanpun melakukan pembatasan terhadap internet masyarakatnya demi menghindari penyebaran kejadian yang sedang sebenarnya terjadi melalui media sosial (Elmileik, 2018). Demonstrasi ini berbuah dengan mundurnya Presiden yang sudah menjabat berpuluh-puluh tahun, yaitu Omar Al-Bashir dari jabatannya pada tanggal 11 Desember 2019.

Sayangnya, walaupun tujuan dari demonstrasi tercapai, salah satunya untuk menurunkan presiden yang sedang menjabat, setelah tercapainya hal ini, terhitung

hingga tahun 2021, perekonomian Sudan masih terus menurun dan terpuruk. Di titik ini Sudan sebenarnya berada di titik di mana sangat membutuhkan bantuan dari negara lain, sayangnya Sudan masih berada dalam daftar negara pendukung teroris AS yang menyebabkannya tidak mudah untuk mendapatkan bantuan dari AS maupun sekutunya, selain itu, Sudan juga justru mendapat kecaman dunia terhadap pelanggaran HAM dan pidana lainnya yang dilakukan terus menerus.

### **2.1.3 Kondisi Politik Sudan setelah Perpecahan**

Pada tanggal 17 Desember 2010, pria bernama Bouazizi membakar dirinya sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintahan Tunisia (Yasmine, 2015). Bouazizi sendiri memiliki pendapatan yang sangat sedikit, belum lagi beliau harus menghidupi keluarganya, dan disamping itu, masih harus membayar pungutan liar di tempat di mana dia berdagang. Saat beliau tidak mampu membayar, barangnya disita, saat meminta bantuan kepada aparatpun tidak diperhatikan. Bouazizi akhirnya melakukan aksi protes dengan membakar dirinya. Hal ini lalu memantik terjadinya solidaritas dengan banyaknya muncul protes terhadap tuntutan untuk menghadirkan demokrasi, ruang publik, dan beberapa hal lainnya. Demonstrasi pertama lalu dilakukan di Tunisia. Hanya dalam beberapa minggu saja setelah demonstrasi berlangsung, Presiden Tunisia yang sudah menjabat selama 23 tahun bernama Zine el Abidine Ben Ali terpaksa turun dari jabatannya (Berita Satu, 2021).

Tidak berhenti di Tunisia, demonstrasi ini menyebar ke beberapa negara lain, seperti Libia, Mesir, Yemen, Suriah, dan Bahrain. Tidak tertinggal, hal yang

sama juga terjadi di Sudan pada tanggal 21 Desember 2011. Ratusan hingga ribuan turun ke jalanan menginginkan adanya revolusi terhadap pemerintahan Sudan yang sudah berdiri terlalu lama dan menyatakan dukungan terhadap Sudan Selatan yang selama ini menginginkan kemerdekaan dari Sudan Utara. Sayangnya, demonstrasi ini menimbulkan banyak korban jiwa hasil dari perlawanan yang diberikan oleh polisi, selain itu, pihak berwajib juga justru menuduh partai oposisi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap demonstrasi yang terjadi.

Demonstrasi lalu terjadi lagi pada Juni – Juli 2012 di Khartoum, Sudan. Sebanyak ratusan warga turun ke jalanan meneriakkan “revolusi adalah pilihan masyarakat; kebebasan, kedamaian, dan keadilan! Masyarakat ingin menjatuhkan rezim!” (Kushkush, 2012). Masyarakat Sudan turun sebagai wujud ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pemerintah dalam pengurangan subsidi bahan bakar. Walau demikian, sebenarnya kedua hal ini hanyalah pemicu saja, alasan sebenarnya adalah seperti yang tertera di atas, yaitu menginginkan adanya revolusi terhadap kepemimpinan pemerintahan Sudan yang telah berdiri terlalu lama.

Seperti yang terjadi sebelumnya, demonstrasi lagi-lagi mendapat perlawanan dari polisi lokal yang lalu menimbulkan sekitar 7 korban jiwa dan menahan ribuan demonstran (Rahman, 2019). Pada tanggal 29 Juni 2012, saat Basahir merayakan 24 tahun kepemimpinannya, demonstrasi terjadi lagi. Sebanyak kurang lebih 10.000 masyarakat turun ke jalan dan meminta Bashir untuk turun. Walau demikian, sama seperti sebelumnya, para pemrotes dibubarkan oleh polisi dan Bashir tetap menjabat. Peristiwa tahun 2013 tidak jauh berbeda, banyak sekali

demonstrasi yang dilakukan masyarakat Sudan mengenai ketidaksetujuan terhadap pengurangan subsidi minyak dan gas, mengenai kenaikan harga bahan pokok yang terus terjadi, dan banyak hal lain yang tidak sesuai dan membuat masyarakat semakin menderita. Hal yang sama terus terjadi, perlawanan dilakukan oleh polisi dan masyarakat harus mundur, walau demikian menanggapi hal ini, Bashir berjanji untuk turun dan tidak lagi mengikuti pemilihan umum pada tahun 2015 mendatang. Sayangnya janji hanya sekedar janji, pada tahun 2015, Bashir terpilih lagi oleh partai pemerintah untuk kembali maju pada pemilihan umum tahun 2015 dan berhasil memenangkannya dengan mengantongi 94% suara (Armandhany, 2015).

Tahun 2019, demonstrasi besar-besaran terjadi lagi. Terdapat banyak hal yang mendukung terjadinya demonstrasi ini, seperti adanya keinginan masyarakat mengenai siapa yang sebaiknya menduduki kursi *chief justice of Sudan* dan *attorney general*, mengenai pertanggung jawaban atas korban jiwa yang disebabkan demonstrasi-demonstrasi sebelumnya, mengenai dampak buruk dari pertambangan, dan masih banyak lagi konflik dan isu yang mendorong masyarakat untuk turun ke jalan meminta keadilan.

Seperti yang disebutkan di atas bahwa perekonomian Sudan berada dalam kondisi yang tidak baik dalam beberapa tahun terakhir, hal itu jugalah yang mendukung terjadinya demonstrasi ini. Saat dimana ekonomi terus memburuk, kebijakan yang pemerintah ambil justru dinilai tidak membantu dan tambah menyusahkan. Masyarakat lalu turun lagi ke jalan dan demonstrasi ini berbuah dengan turunnya Bashir dari jabatan yang dipertahankannya 30 tahun terakhir pada 11 April 2019 (Augusti, 2019). Selain itu, Bashir juga menjadi tersangka kasus

genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang terhadap sekitar 300.000 nyawa korban konflik Darfur pada tahun 2003 (CNBC, 2003). Konflik Darfur sendiri secara singkat merupakan sebuah konflik yang terjadi pada tahun 2003-2004 yang dimana milisi yang diberi dukungan penuh oleh pemerintah, bernama Janjaweed melakukan pembunuhan, memperkosa, menjarah, dan membakar desa-desa yang dimiliki oleh para pendukung pemberontak dan kaum separatisme pemerintah Sudan pada masa itu.

Hal ini menunjukkan seberapa rusuh dan kacanya situasi di negara ini. Dalam kondisi seperti inipun, Sudan tidak bisa mendapatkan banyak bantuan negara lain karena masih dalam daftar negara pendukung teroris AS dan jangankan mendapat bantuan, Sudan justru dikecam banyak negara lain karena juga dianggap sebagai negara pelaku pelanggaran HAM dikarenakan oleh pembunuhan dan penyerangan terhadap demonstran yang melakukan aksi demonstrasi di Sudan. Michelle Bachet sebagai komisioner tinggi bidang HAM PBB menyatakan bahwa tindakan represif hanyalah akan memperkeruh keadaan, dan meminta Sudan untuk memberikan ruang bagi masyarakatnya untuk berdemonstrasi dengan aman (VOA, 2019). Karena isunya sudah mendunia, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa citra Sudan dimata dunia tidaklah baik. Apalagi citranya untuk negara lain yang memberi bantuan kepada negara pelaku pelanggaran HAM. Maka dari itu, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Sudan berada di situasi yang terpuruk dan harus melakukan segala cara yang ada untuk bertahan.

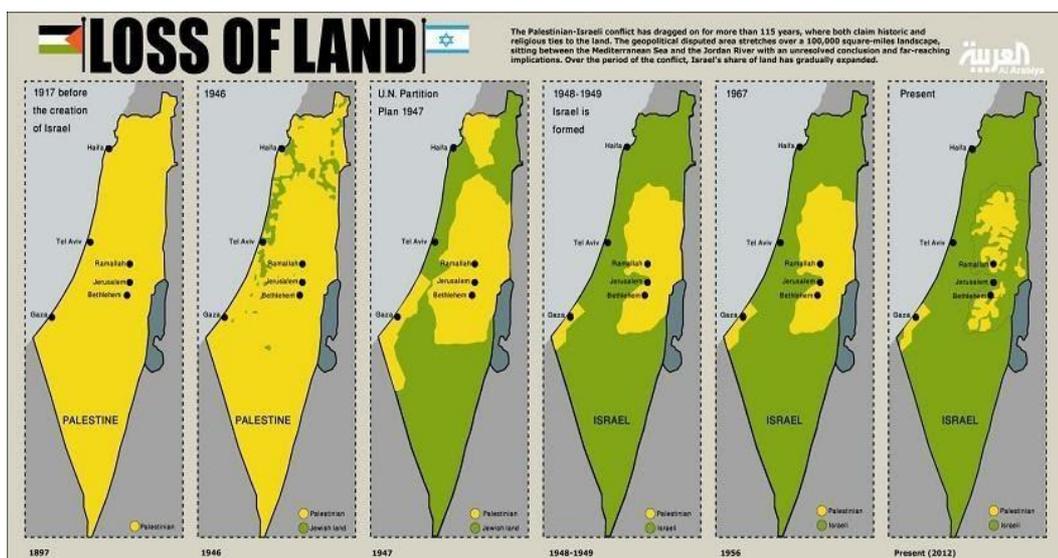
## **2.2 Gelombang Pembukaan Hubungan Diplomatik Negara Timur Tengah dengan Israel**

Pada saat Perang Dunia I (PD I), di mana Inggris menjadi pemenangnya, dalam sebuah perjanjian bernama Deklarasi Balfour, Inggris memberikan sebuah wilayah bagi kaum Yahudi. Hal ini menimbulkan sebuah persepsi bagi kaum Yahudi, bahwa Palestina merupakan wilayah hak mereka. Selain dari adanya perbedaan persepsi dan opini antara keduanya (kaum Yahudi dan masyarakat Palestina), masyarakat Palestina merasa bahwa adanya pemaksaan pendirian, keyakinan, dan budaya Yahudi terhadap masyarakat Palestina. PBB pun turun tangan mengenai konflik ini melalui resolusi 181 yang diadopsi 29 November 1947. Resolusi ini merekomendasikan dibaginya wilayah Palestina menjadi dua negara bagian, satu untuk Arab, dan satunya untuk negara Yahudi. Walau demikian, masyarakat Palestina tidak menerima keputusan yang PBB putuskan, masyarakat Palestina menuntut wilayahnya secara penuh.

Inggris sebagai pemenang PD I, meninggalkan Palestina dan Israel lalu menjadi sebuah negara pada tahun 1948 (Berty, 2021). Sejak saat itu, perang antara kedua negara terus berlanjut dan wilayah Palestina justru terus menerus menurun.

Berikut merupakan gambar yang menunjukkan penurunan dari luas wilayah Palestina seiring berjalannya waktu :

**Gambar 2.3 Gambar Peta Luas Wilayah Palestina Tahun 1897-2012**



Sumber : <https://www.solopos.com/peta-palestina-sejak-kedatangan-israel-hingga-rezim-donald-trump-1044700> Tahun 2020.

Wilayah berwarna kuning menggambarkan wilayah Palestina, sementara wilayah berwarna hijau menggambarkan wilayah Israel. Terlihat dari perbandingan peta di atas bahwa wilayah Palestina semakin hari semakin mengecil dan Israel semakin hari semakin membesar. Walau demikian, sebenarnya sebagian besar negara di dunia berpihak pada Palestina, terlebih lagi negara-negara Islam atau negara dengan mayoritas penduduk muslim. Hal ini dapat dilihat dari negara tetangganya yang sebagian besar menunjukkan dukungannya terhadap Palestina dengan tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Pada tahun 2019, sebanyak 193 anggota mengakui Palestina. Tidak hanya itu, terdapat suatu organisasi internasional bernama Organisasi Kerjasama Islam

(OKI) beranggotakan 57 negara, dinobatkan sebagai organisasi terbesar kedua setelah PBB (Nailufar, 2020) aktif memberikan dukungannya terhadap Palestina. Jika membahas mengenai dukungan terhadap Palestina, hal ini tidak bisa dijauhkan dari dukungan negara tetangganya, yaitu negara-negara Arab, seperti Sudan, UEA, Bahrain, dan lain-lain. Selama berpuluh-puluh tahun, mayoritas negara Arab menunjukkan solidaritasnya terhadap Palestina dengan tidak jarang melakukan boikot, mengutuk perilaku Israel, rapat membahas mengenai perjuangan kemerdekaan Palestina, dan lain-lain. Beberapa hal bukti dukungan negara Arab terhadap Palestina dapat dilihat dari Sudan yang membentuk UU boikot Israel, dimana jika masyarakatnya melanggar, hukuman 10 tahun penjara sudah menanti. Hal lain dapat dilihat dari kedatangan pemimpin negara Sudan ke Indonesia dalam KTT OKI ke-5 yang membahas mengenai pembebasan Palestina.

Walau demikian, yang terjadi pada tahun 2020 terakhir justru berubah 180 derajat. Tiba-tiba seakan-akan terjadi sebuah gelombang pembukaan hubungan diplomatik antara negara Arab dengan Israel, sebuah hal yang sangat tidak disangka akan dilakukan oleh para pendukung Palestina, terjadi pada tahun 2020. Pada tanggal 13 Agustus 2020, melalui telepon, Presiden Trump dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sepakat untuk membuka hubungan diplomatik antara UEA dan Israel. Tidak lama setelahnya, pada tanggal 11 September 2020, Trump mengumumkan juga pembukaan hubungan diplomatik antara Bahrain dengan Israel (CNN, 2020).

### **2.2.1 Pembukaan Hubungan Diplomatik UEA-Israel dan Bahrain-Israel**

Pada tanggal 13 Agustus 2020, setelah berpuluh tahun lamanya tidak ada negara Teluk yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel, lewat diresmikannya dan diumumkankannya Perjanjian Abraham oleh Presiden AS Donald Trump di Washington, pembukaan hubungan diplomatik UEA dan Israel resmi terjadi (Wicaksono, 2020). Pembukaan hubungan diplomatik antara UEA dan Israel resmi menjadi pembukaan hubungan diplomatik ketiga antara Israel dengan negara Arab. Normalisasi hubungan dan pembukaan hubungan diplomatik antara UEA dan Israel dihadiri oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan Presiden UEA, Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Dengan adanya perjanjian ini, kedua negara resmi sepakat untuk membuka dan mengembangkan kerjasama ekonomi, pariwisata, investasi, dan lain-lain.

Sebenarnya, dibalik terjadinya pembukaan hubungan diplomatik antara UEA dan Israel, terdapat beberapa tantangan dari luar terhadap dilakukannya pembukaan hubungan diplomatik ini. Pertama pastinya dari Palestina, di mana Palestina sendiri akibat terjadinya pembukaan hubungan ini menjadi kehilangan satu pendukungnya dari negara Arab. Kedua adalah dari Turki. Turki sendiri mengutuk perjanjian ini dan mengancam untuk mengurangi menarik duta besarnya dari UEA dan menanggukkan hubungan diplomatiknya dengan UEA.

Walau demikian, seperti yang bisa dilihat, faktanya UEA tetap melakukan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Hal itu dapat dimengerti bahwa ternyata yang UEA dapatkan dari pembukaan hubungan ini lebih banyak

dibandingkan tantangan atau kehilangan yang harus dihadapi. Terdapat beberapa alasan dan keuntungan dari mengapa UEA memutuskan untuk dilakukannya pembukaan hubungan diplomatik antara negaranya dengan Israel.

Pertama mengenai Palestina, walaupun di satu sisi UEA seakan-akan meninggalkan Palestina, namun sebenarnya tidak sepenuhnya begitu, dengan dibukanya hubungan diplomatik antara kedua negara, Israel berjanji untuk membatalkan rencananya menganeksasi *West Bank* (Elgindy, 2021). Selain itu, dengan adanya pembukaan hubungan diplomatik ini, UEA juga berharap bahwa akan dapat menahan Israel dari mengambil keputusan-keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan dari UEA sendiri, jadi dalam hal ini, UEA justru berharap dapat lebih memperjuangkan Palestina dengan cara yang baru. Selain dari hal ini, dilakukannya pembukaan hubungan dikarenakan oleh adanya kesamaan ancaman yang kedua negara ini miliki, yaitu ancaman dari Iran dan Turki. Dan yang ketiga, di atas semuanya itu, salah satu alasan terbesar dan terkuat adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki citra dan hubungannya dengan AS. Dengan adanya perkembangan hubungan antara UEA dan AS, UEA berharap untuk mendapatkan akses ke *hardware* dan *software* canggih keamanan AS yang belum bisa UEA dapatkan selama hubungannya dengan AS masih buruk.

Hal ini terbukti benar adanya. Keputusan UEA membuka hubungan sepertinya tidak sia-sia karena lebih banyak keuntungan yang didapatkan hanya dalam jangka waktu beberapa bulan. Pada tanggal 16 Agustus 2020, Israel dan UEA langsung membentuk layanan telpon langsung antara kedua negara (BBC, 2020). Kedua negara juga secara cepat langsung mengupayakan penerbangan langsung

antara kedua negara, dan pada tanggal 28 Agustus, terdapat penerbangan komersial pertama yang terbang dari Tel Aviv ke Abu Dhabi (Thomson Reuters, 2020). Pada tanggal 3 September, pesawat kargo yang rencananya akan terbang rutin setiap minggu, terbang pertama kalinya ke UEA membawa alat pertanian dan alat-alat canggih lainnya.

Selain dari kerjasama dalam hal transportasi yang dibuka, dan kerjasama dalam hal permata, pertahanan, dan kecerdasan artifisial yang sudah berjalan lama, perjanjian antara kedua negara ini membuka kepada kerjasama yang lebih luas lagi, seperti kerjasama antara The Emirati Company APEX National Investment dan Israel's Tera Group dalam penanggulangan COVID-19 (Bloomberg, 2020), kerjasama antara Habtoor Hospitality dan Elli's Kosher Kitchen dalam hal kuliner (Reporter, 2020), dan masih banyak lagi.

Selain daripada UEA, terdapat satu negara lagi yang juga membuka hubungan diplomatik dengan Israel pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan Perjanjian Abraham pula, yaitu Bahrain. Bahrain resmi menjadi negara Arab keempat yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel pada 11 September 2020 melalui kabar yang dicetuskan oleh Trump. Beberapa waktu setelahnya, pihak Bahrain, Israel, dan AS merilis pernyataan bersama menyatakan bahwa ketiga negara sudah membuka hubungan diplomatik, dan dengan dibukanya hubungan diplomatik antara kedua negara, Bahrain dan Israel berkomitmen untuk terus bekerjasama dan mengembangkan hubungan antara kedua negara dalam bidang kesehatan, teknologi, dan pertanian. Selain itu, hubungan antara Bahrain dan AS juga berkembang dengan disepakatinya perjanjian ini. Walaupun dikarenakan

terjadinya pembukaan hubungan diplomatik Bahrain dan Israel mendapatkan banyak kecaman dari Palestina dan Hamas, hubungan diplomatik kedua negara tetap terus dikembangkan. Bahrain melalui Menteri Dalam Negerinya, Rashid bin Abdullah Al Khalifa menjelaskan mengenai dasar alasan dari dibukanya hubungan diplomatik dengan Israel. Rashid bin Abdullah menjelaskan seberapa penting dilakukan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel dengan menyebutkan bahwa dibukanya hubungan adalah demi melindungi kepentingan dan entitas Bahrain. Bahrain juga menyatakan bahwa walau dilakukannya pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, dukungannya terhadap Palestina tetap akan terus dilakukan dan kemerdekaan Palestina akan terus diperjuangkan (Firmansyah, 2020).

Tidak bisa dipungkiri memang berdasarkan pengalaman dari beberapa negara yang resmi melakukan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, keuntungan yang didapatkan justru lebih banyak daripada kerugian atau tantangan yang harus dihadapi. Apalagi, keuntungan tersebut tidak hanya datang dari Israel, namun juga dari AS.

### **2.3 Keuntungan bagi Sudan**

Setelah dilakukannya pembukaan hubungan diplomatik antara Israel dengan UEA dan Bahrain, AS menargetkan Sudan untuk menjadi negara Arab ketiga yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Target ini terlihat dari hal yang dicetuskan dan dibahas oleh Menteri Luar Negeri AS dalam sebuah pertemuan, yaitu mengenai pembukaan hubungan diplomatik antara Sudan dan

Israel, yang di mana pada saat itu, Sudan masih belum memberikan keputusan untuk melakukan hal demikian. Walau demikian, usaha yang dilakukan tidak berhenti di sini. Dalam pertemuan antara AS dan UEA, topik mengenai penghapusan Sudan dalam daftar negara pendukung teroris AS terus dibahas. Tidak bisa dipungkiri, jika melihat dari beberapa negara Arab yang sebelumnya yang secara resmi sudah membuka hubungan diplomatik dengan Israel, keuntungan yang didapatkan tidaklah sedikit dan sangatlah menarik.

*List of State Sponsors of Terrorism* atau daftar negara pendukung terorisme adalah sebuah istilah atau daftar yang AS gunakan untuk menandai negara yang secara terus menerus diduga memberi dukungan terhadap aktivitas terorisme internasional. Terdapat beberapa negara yang masuk dalam daftar negara pendukung terorisme AS, diantaranya adalah Kuba, Suriah, Iran, Korea Utara, Irak, Libia, Yemen Selatan, dan Sudan. Sudan masuk menjadi salah satu negara dalam daftar tersebut pada tanggal 12 Agustus 1993 karena Amerika menduga Sudan memiliki hubungan dengan anggota *Abu Nidal Organization*, *Hezbollah*, dan *Islamic Jihad* (Holmes, 1993).

Kerugian bagi negara yang masuk dalam daftar AS ini tidaklah sedikit. Negara yang masuk dalam daftar negara pendukung terorisme AS harus merasakan sanksi yang AS berikan, seperti larangan ekspor dan penjualan senjata, larangan untuk mendapatkan pendampingan ekonomi, pengenaan beberapa pembatasan bantuan keuangan, seperti bantuan Bank Dunia, dan institusi lainnya, larangan masuk ke AS, dan lain-lain. Maka dari itu, menjadi salah satu negara dalam daftar tersebut tidaklah mudah karena AS merupakan negara hegemoni yang memiliki

kuasa yang besar, dimana jika AS memberikan penolakan, tidak akan mudah bagi negara tersebut mendapatkan penerimaan dari negara atau institusi lainnya.

Suatu tawaran mengenai penghapusan nama suatu negara dari daftar negara pendukung terorisme terhadap AS merupakan suatu konsesi yang sangat menarik bagi negara yang masuk daftar pendukung terorisme buatan AS. Sudan adalah negara yang tertarik dengan tawaran AS tersebut. Hal ini disampaikan oleh Trump melalui cuitan di twitternya yang mengatakan “Akhirnya, Keadilan untuk rakyat Amerika dan langkah besar untuk Sudan. Setelah disetorkan, saya akan mencabut Sudan dari daftar Negara Sponsor Terorisme” (DW, 2020). Di mana dalam kondisinya yang sangat terpuruk, bahkan sejak turunnya Bashir, Sudan harus mengalami inflasi setinggi 170%. Kondisi ini sangatlah tidak baik, di mana dalam kondisi yang sangat buruk ini, tidak ada negara atau institusi yang dapat Sudan mintai bantuan karena tidak hanya Sudan masih berada dalam daftar negara pendukung terorisme AS, Sudan juga justru mendapat kecaman dari negara luar mengenai pelanggaran dan pidana yang negara ini lakukan. Maka dari itu, tawaran AS mengenai penghapusan Sudan dari daftar pastinya sangatlah menarik karena tidak hanya Sudan dapat memperbaiki hubungannya dengan AS, akan lebih mudah juga bagi Sudan untuk mendapatkan bantuan luar negeri baik dalam hal ekonomi, maupun dalam hal lainnya.

Tidak hanya dalam hal penghapusan Sudan dari daftar negara pendukung terorisme, AS memberi tawaran kepada Sudan mengenai banyak hal. Walaupun pada faktanya, Sudan harus melakukan pembayaran pada AS sebesar 355 juta dolar

AS sebagai kompensasi pada korban dan keluarga korban dari aksi terorisme yang pernah terjadi demi mendapatkan penghapusan nama dari daftar negara pendukung terorisme AS, namun dapat dilihat bahwa keuntungan yang kemungkinan akan didapatkan justru melebihi dari hal yang harus dikeluarkan pada awalnya.

Dengan dilakukannya penghapusan Sudan dari daftar negara pendukung terorisme, AS juga berjanji untuk menghilangkan pembatasan-pembatasan yang sebelumnya ada sebelum penghapusan, dan akan mulai mengupayakan kerjasama ekonomi dengan Sudan. Selain dari pembukaan kerjasama ekonomi, AS juga berjanji untuk memberikan bantuan ekonomi dan kemanusiaan kepada Sudan (Ward, 2020). Dengan dilakukannya pembukaan hubungan antara Sudan dan Israel, Israel juga berjanji untuk membuka hubungan penjualan senjata antara kedua negara ini. Tidak hanya terhadap pihak yang terlibat, seperti AS dan Israel, bahkan UEA juga berjanji untuk memberikan bantuan ekonomi dan kemanusiaan pada Sudan saat pembukaan hubungan diplomatiknya dengan Israel sudah resmi. Dengan keadaan ekonomi Sudan yang tidak menunjukkan peningkatan, janji dan kesempatan seperti ini pasti sangatlah menarik dan menjadi salah satu harapan bagi Sudan untuk bangkit.

#### **2.4 Pembukaan Hubungan Diplomatik Sudan dengan Israel**

Pada September 2020, UEA, Bahrain, Israel, dan beserta dengan AS melakukan penandatanganan terhadap Perjanjian Abraham yang berisi mengenai pembukaan hubungan antara Israel dengan UEA dan Bahrain. Pada saat dilakukannya penandatanganan hal ini, AS sekaligus menyatakan bahwa akan

mengupayakan pembukaan hubungan diplomatik dengan beberapa negara Arab lainnya. Walaupun tidak disebutkan oleh AS secara langsung negara Arab apa saja yang menjadi target AS, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Sudanlah salah satunya.

Pada tanggal 13 Oktober 2020, Menteri Kehakiman Sudan, Nasiruddin Abdul Bari mengadakan pertemuan dengan Menteri Kerjasama Regional Israel, Isawi Furajj dan Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Idan Roll di Ibu Kota UEA, Abu Dhabi. Pertemuan antara perwakilan dua negara ini membahas mengenai kerjasama yang bisa dikerjakan bersama antara Sudan dan Israel di masa yang akan datang, yang di mana sangat terlihat sebagai salah satu upaya Israel untuk mendorong terjadinya pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara (Assegaf, 2021). Pertemuan ini kurang lebih membahas mengenai kerjasama dalam bidang pendidikan, budaya, teknologi, dan ekonomi yang dapat terjadi pada saat pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara terjadi. Pada titik ini, belum ada deklarasi atau keputusan resmi yang menyatakan mengenai pembukaan hubungan kedua negara. Walau demikian, sebenarnya pertemuan 13 Oktober ini bukanlah pertemuan pertama antara kedua negara.

Pada tanggal 3 Februari 2020, Pemimpin Militer Sudan, Jendral Abd al-Fattah al-Burhan dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu sudah melakukan pertemuan di Uganda membahas mengenai upaya Sudan memperjuangkan kepentingan dan keamanan negaranya. Menindak lanjuti rencana dan upaya pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara, tidak hanya Israel dan Sudan saja yang terlibat, AS pun juga ikut melakukan banyak upaya untuk terjadinya pembukaan hubungan diplomatik kedua negara. AS diwakili oleh

mantan Sekretaris Negeranya, Pompeo terbang mengunjungi Sudan untuk membahas lebih mengenai pembukaan diplomatik antara kedua negara. Dibicarakan mengenai tuntutan AS meminta Sudan memberikan ganti rugi terhadap korban terorisme, di sisi lain, Sudan juga meminta bantuan ekonomi dari AS, dan lain-lain. Walau demikian, pada pertemuan ini, keputusan untuk dilakukannya pembukaan hubungan diplomatik belum juga terjadi. Dialog yang dianggap sebagai "*final push*" yang diikuti oleh Israel, Sudan, dan AS dilakukan pada 22 Oktober 2020 di Khartoum dan pada 23 Oktober 2020, AS secara resmi mendeklarasikan bahwa Sudan menjadi negara Arab ketiga yang melakukan penandatanganan terhadap Perjanjian Abraham dan resmi membuka hubungan diplomatik dengan Israel.